



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA  
BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA UNTUK MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT**

**(Studi Implementasi Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1  
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**OLEH :**

**TIRTA CAKRA WIBAWA**

**NIM. 115010107111068**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA  
AGROWISATA UNTUK MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi Implementasi  
Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun  
2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)**

Oleh:

Tirta Cakra Wibawa

115010107111068

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 19860111 002

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 19860111 002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., MS.i

NIP. 19620805 198802 1 001



Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository  
Repository  
Repository  
Repository  
Repository



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

Repository  
Repository  
Repository  
Repository  
Repository

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 237/Plagiasi/FH/2016

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : TIRTA CAKRA WIBAWA  
NIM : 115010107111068  
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA  
BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA UNTUK MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
(Studi Implementasi Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1  
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**

Malang, 7 Maret 2016  
Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Puha Djatnika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

Repository  
Repository  
Repository  
Repository  
Repository

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository  
Repository  
Repository  
Repository  
Repository

Repository  
Repository  
Repository  
Repository  
Repository

## RINGKASAN

Tirta Cakra Wibawa, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2016, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi Implementasi Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai implementasi kebijakan pengembangan kawasan kota batu sebagai sentra agrowisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (studi implementasi pasal 5 huruf e peraturan daerah kota batu nomor 1 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan). Adapun isi pasal 5 huruf e yaitu; pemberdayaan masyarakat setempat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu telah melaksanakan program-program untuk pengembangan kawasan Kota Batu sebagai sentra agrowisata yaitu dengan; penyelenggaraan kepariwisataan Kota Batu, jenis wisata Kota Batu, perkembangan sektor pariwisata dan transportasi Kota Batu, strategi pengembangan sektor wisata berbasis kawasan, kontribusi sektor wisata sebagai penyerap tenaga kerja dan pendapatan pengembangan kepariwisataan di Kota Batu, strategi dan pendekatan pengembangan agrowisata di Kota Batu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah; (1) Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan Kota Batu sebagai sentra agrowisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan Pasal 5 Huruf e Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan? (2) Apa saja Faktor Penghambat implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dan bagaimana solusinya?

Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi internet. Teknik analisis data adalah deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan kawasan kota batu sebagai sentra agrowisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (studi implementasi pasal 5 huruf e peraturan daerah kota batu nomor 1 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan), pemerintah kota batu dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu telah melaksanakan Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 meskipun pelaksanaannya belum efektif, utamanya dalam hal pengawasan.

Kata kunci: kebijakan, pengembangan kawasan, sentra agrowisata.



## SUMMARY

Tirta Cakra Wibawa, the State Administration Law, Faculty of Law, Brawijaya University, March 2016, AREA DEVELOPMENT POLICY IMPLEMENTATION AS STONE CITY CENTER TO ENHANCE ECONOMIC COMMUNITY AGROWISATA (Study on Implementation of Article 5 Letter e Regional Regulation No. 1 Year 2013 Stone on the Implementation of Tourism)

In this thesis, the author raised regarding the implementation of the policy of development of the area as a center of Stone Town agrotourism to improve the economy of the community (the study of the implementation of article 5 letter e regulation stone town area number 1 of 2013 on the operation of tourism). The content of Article 5 letter e ie; empowerment of local communities. Department of Tourism and Culture Stone has been conducting programs for the development of the area as a center of Batu City with agro namely; tourism operations Kota Batu, Batu types of travel, tourism and transport sector developments Kota Batu, based tourism sector development strategy department, the contribution of tourism sector as the main employer and earnings development of tourism in Kota Batu, strategy and approach to the development of agrotourism in Kota Batu.

Based on this background, the formulation of research problems are; (1) How is the implementation of regional development policy Batu City as a center for agrotourism to boost the economy of the community is based on Article 5 Letter e Perda Kota Batu No. 1 Year 2013 on the Implementation of Tourism? (2) Any Factors hindering the implementation of article 5 letter e Regional Regulation No. 1 Year 2013 Stone on the Implementation of Tourism and what's the solution? Then this kind of research using empirical jurisdiction with sociological juridical approach. The location of this research in the Department of Tourism and Culture in Stone. Types and Sources of data are the primary data and secondary data. The primary data can be obtained by direct interviews with respondents. Secondary data were obtained from literature studies, study the documentation and study of the internet. The data analysis technique is descriptive analysis. From the results of research on policy implementation development of the area of Stone Town as a center for agro-tourism to boost the economy of the community (the study of the implementation of article 5 paragraph e of local regulations rock city No. 1 of 2013 on the operation of tourism), the city of stone in this case, the Department of Tourism and Culture in Stone has implemented Article 5 letter e Regional Regulation No. 1 Year 2013 Batu although implementation has not been effective, particularly in terms of supervision.

Keywords: policy, regional development, agro-tourism centers.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul:

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi**

**Implementasi Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)**

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan para pihak yang terkait lainnya maka skripsi ini tidak akan terwujud oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Nurdin., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas bimbingan yang diberikan
4. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, atas bimbingan, motivasi, ilmu dan semangatnya
5. Bapak Ir. Sugeng Pramono selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu
6. Bapak K.Latif Setiawan. SH selaku Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu



7. Bapak Chairil Fajar Rofi, SSi, MSi selaku Kabid Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu
8. Bapak Budiman Adi Purwanto, SH., MH., Drs. M. Thamrin Muis (Alm) dan Ibu Hj. Wenny Gustiati, SH., M.Hum selaku orang tua tercinta dan kakak tercinta Thaufan Eko Saputra, Kiky Maria, Amd, Novizal Handoko, ST, Eric Novevan Ezra, SE yang selalu memberikan seluruh cinta, perhatian dan dorongan baik materiil maupun spiritual dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan laporan penelitian ini
9. Elok Rahmawati selaku kekasih, teman, sahabat, dan kakak yang selalu sabar menemani dan memberikan dukungan untuk laporan penelitian ini.
10. Sahabat, teman-temanku dan semua pihak khususnya Dhimas Haryowidanto, SH., Reno Rendika E, Dovan Ramandha, SH., Cosman Oktaniel G, SH., I Putu Adeks Pl, SH., Agustinus Riyan, SH yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Malang, Maret 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Bagan.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Ringkasan.....	ix
Summary.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Implementasi kebijakan.....	13
1. Aktor dan Pelaku Pembuat Kebijakan Publik.....	15
2. Dampak Implementasi Kebijakan.....	18
3. Perspektif Teoritik Implementasi Kebijakan.....	21
4. Model Proses Implementasi Kebijakan.....	22
5. Pariwisata.....	24
6. Kegiatan Pariwisata.....	26
7. Peran Sektor Pariwisata.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis Data.....	32



E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
G. Populasi Sampel .....	34
H. Teknik Analisis Data .....	34
I. Definisi Operasional .....	35

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kota Batu .....	36
B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu .....	41
1. Struktur Organisasi Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu .....	41
2. Penjabaran Tugas dan Fungsi .....	42
C. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat .....	57
a. Penyelenggaraan kepariwisataan Kota Batu .....	59
b. Jenis wisata Kota Batu .....	64
c. Perkembangan sektor pariwisata dan transportasi Kota Batu .....	67
d. Strategi pengembangan sektor wisata berbasis kawasan .....	68
e. Kontribusi sektor wisata sebagai penyerap tenaga kerja dan pendapatan pengembangan kepariwisataan di Kota Batu .....	69
f. Strategi dan pendekatan pengembangan Agrowisata di Kota Batu dengan <i>community based tourism</i> .....	70
a. program-program pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan Agrowisata .....	70
b. keterlibatan masyarakat didalam proses perencanaan pengembangan Agrowisata di Kota Batu .....	71
c. sarana dan prasarana pendukung pengembangan Agrowisata di Kota Batu .....	71
d. promosi Agrowisata di Kota Batu .....	72





DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 ..... 4

Tabel 2 Orisinalitas Penelitian ..... 10

Tabel 3 Jumlah Desa/kelurahan/RW dan RT per Kecamatan di Kota Batu .... 39



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Gambar Kota Batu ..... 36

Gambar 2 Struktur Organisasi Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu ..... 41

Gambar 3 Grafik Persentase Pengunjung Objek Wisata Kota Batu Tahun  
2013 ..... 68

Gambar 4 Struktur Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan ..... 71



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi ..... L-1

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi..... L-2

Lampiran 3 Surat Permohonan Survey..... L-3

Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian/Survey ..... L-4

Lampiran 5 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang  
Penyelenggaraan Kepariwisataaan ..... L-5

Lampiran 6 Surat Keterangan Deteksi Plagiasi ..... L-6



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan kota merupakan suatu proses berupa perubahan kondisi kota menjadi lebih baik yang berlangsung lama dan terus menerus. Perubahan ini meliputi segala sektor yaitu sektor jasa, industri dan pertanian (pengolahan hasil pertanian) dan di segi penerimaan masyarakatnya atau di segi pengeluaran konsumsi, investasi, dan pemerintah daerah serta ekspor-impornya (*net export*). Selanjutnya diharapkan agar kegiatan perekonomian kota itu membuka kesempatan kerja lebih banyak, sehingga tercapailah pemerataan di segala bidang dalam kehidupan kota.

Pembangunan dan pengembangan disetiap daerah kabupaten dan kota telah dilaksanakan secara mandiri sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001. Adanya otonomi daerah tersebut membuat daerah lebih aktif menggali sumber potensi pendapatan asli daerah untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Setiap daerah harus melepaskan ketergantungan dari pemerintah pusat dan mengembangkan otonomi daerah melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat menentukan prioritas pembangunannya sesuai dengan potensi yang dimiliki

<sup>1</sup> Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Semarang: Kanisius.

<sup>2</sup> Mudrajat Kuncoro. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang*. Erlangga, Jakarta, 2004, Hal 13



oleh daerahnya masing-masing yang salah satunya adalah potensi dalam sektor pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dan berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti dikemukakan oleh Cohen dan Spillane menyatakan bahwa memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha di sektor formal dan informal, peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai pajak dan retribusi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan. Kemudian sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sektor dengan pertumbuhan cepat ini telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi global.<sup>3</sup>

Tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran merupakan dua permasalahan besar di Indonesia. Disisi lain, Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam dapat dikembangkan menjadi tempat pariwisata untuk memberikan kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena adanya permintaan dari para wisatawan yang datang. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha hotel, restoran, jasa penunjang angkutan dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata sehingga peluang tersebut akan memberikan kesempatan kepada



masyarakat lokal untuk bekerja sehingga masyarakat akan memperoleh pendapatan dari pekerjaan tersebut.

Salah satu kota yang memiliki kekayaan dan keindahan alam yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai tempat wisata adalah Kota Batu.

Sejak tahun 2002 pemerintah Kota Batu menjadikan potensi sektor pariwisata sebagai alat untuk membangun perekonomian suatu daerahnya. Batu sebelumnya merupakan bagian dari kota administratif Kabupaten Malang yang kemudian ditingkatkan statusnya pada tahun 2001 menjadi Kota. Kota Batu merupakan kota pariwisata dengan basis pertanian, hampir sebagian besar penduduk Kota Batu bermata pencaharian utama sebagai petani.

Hal ini terlihat dari data sementara hasil sakernas Kota Batu yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu tahun 2011 dari 93.096 orang penduduk Kota Batu usia 10 tahun keatas yang bekerja di tahun 2010; 34.011 orang bekerja di sektor pertanian atau sama dengan 36,53 % penduduk Kota Batu pekerjaan utamanya di sektor pertanian. Lebih berkembangnya sektor pariwisata di Kota Batu membawa dampak perubahan rona wilayah Kota Batu pada umumnya.

Visi Kota Batu sebagai kota pariwisata berbasis pertanian meningkatkan pembangunan-pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata menjadi sasaran utama karena kegiatan pariwisata mampu menyerap tenaga kerja yang relatif besar. Tentunya pengembangan usaha pariwisata juga menarik migrasi penduduk dari luar daerah Kota Batu untuk membangun pemukiman dan berinvestasi dibidang pariwisata.



Tabel 1. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014

No	Pekerjaan Utama	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Pertanian	23.792	10.219	34.011
2	Penggalian	277	49	326
3	Industri	4.269	3.257	7.526
4	Listrik dan Air	112	36	148
5	Konstruksi	7.217	197	7.414
6	Perdagangan	11.655	11.218	22.873
7	Transportasi	3.511	333	3.844
8	Keuangan	919	521	1.440
9	Jasa-jasa dan Lain-lain	8.353	7.161	15.514
	<b>Kota Batu</b>	<b>60.105</b>	<b>32.991</b>	<b>93.096</b>

Sumber: BPS Kota Batu, 2014

Pembangunan pariwisata Kota Batu mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat karena dengan berkembangnya sektor pariwisata mendorong pertumbuhan sektor hilir agribisnis mencakup agroindustri pedesaan, industri manufaktur, makanan, pelayanan kebutuhan restoran hotel-hotel hingga outlet – outlet agribisnis maupun toko oleh – oleh cinderamata.<sup>4</sup>

Dalam rangka mengetahui keberlanjutan pengembangan kawasan agropolitan

<sup>4</sup> Sabil, Q. 2008. Kajian Kelembagaan. Agroindustri Pangan Olahan di Kawasan – Kawasan Agropolitan Kota Batu Propinsi Jawa Timur. Thesis. IPB. Bogor. 130p.



di Kota Batu perlu dilakukan studi keberlanjutan pengembangan kawasan agropolitan yang meliputi tiga kecamatan di Kota Batu. Pengembangan kawasan kota Batu difokuskan pada dua aspek yaitu pengembangan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata.

Pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu terdapat pada beberapa kawasan pertanian yang kondisi fisik, sosial budaya dan ekonominya cenderung kuat mengarah ke kegiatan pertanian. Keberadaan gunung, hutan, dan hamparan pertanian yang mendominasi keruangan Kota Batu, sangat sesuai untuk pengembangan wisata alam terkait dengan potensi yang ada di gunung, hutan, dan kawasan pertaniannya. Selain itu sebagai kota yang dikenal dengan komoditas apelnnya, pemandangan alam, air terjun, sumber air panas, agrowisata, wisata petualangan, pemanfaatan pekarangan rumah penduduk yang sebagian besar digunakan untuk tanaman bunga, apel, apotik hidup, dan lain sebagainya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dari segi wisata dan lingkungan hidup di samping nilai ekonomis.

Kota Batu merupakan peningkatan kota administratif dari Kabupaten Malang, berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu. Kota Batu terdiri atas 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030, Kota Batu ditetapkan berdasarkan fungsi wilayahnya terbagi atas 3 Bagian Wilayah Kota (BWK).

Kecamatan Batu ditetapkan sebagai BWK I sebagai peruntukan pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan



perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesanggrahan. Kecamatan Junrejo sebagai BWK II yang diperuntukkan sebagai pengembangan permukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo dan BWK III sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Bumiaji dengan pusat pelayanan di Desa Punten.

Sektor pariwisata mampu menyumbang peningkatan pertumbuhan dan pendapatan daerah Kota Batu, sedangkan kegiatan pertanian yang menopang kehidupan hampir sebagian besar penduduk kota Batu memberikan sumbangan yang tidak terlalu besar. Sektor pertanian merupakan sektor yang unik dan mempunyai ciri khas yang tersendiri dalam sektor perekonomian.

Sektor ini sangat banyak menampung luapan tenaga kerja, tetapi secara umum kontribusi sektor pertanian dalam menyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidaklah sebesar sektor perdagangan hotel dan restoran. Pada tahun 2000 sektor pertanian menyumbang nilai PDRB sebesar 22,36 % dan di tahun 2010 turun menjadi 20,64 % sedangkan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, jasa, angkutan, komunikasi) sebesar 65, 95 % di tahun 2000 dan 68,67 % di tahun 2010.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Badan Pusat statistik Kota Batu. 2011. Kota Batu dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik. Kota Batu



Berdasarkan kajian teoritis dan empiris di atas dapat diketahui bahwa sektor wisata Kota Batu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan dapat memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah.

Pengembangan kawasan wisata sangat dibutuhkan guna memaksimalkan potensi yang ada di Kota Batu. Dari latar belakang masalah ini, penulis bermaksud melakukan kajian mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan Kota Batu sebagai sentra agrowisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan Pasal 5 Huruf e Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata?
2. Apa saja Faktor Penghambat implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan bagaimana solusinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan kawasan Kota Batu sebagai sentra agrowisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu No.1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.



2. Untuk menganalisis Faktor-faktor Penghambat implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang akan diperoleh, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang strategi pengembangan kawasan wisata.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu administrasi pada umumnya dan khususnya dalam hal implementasi kebijakan untuk mengembangkan wisata daerah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Untuk Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah kota batu sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam hal kepariwisataan khususnya dalam bidang Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.



b. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat kota batu tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota batu apakah sudah berjalan dengan baik atau belum terutama dalam hal Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.



E. Tabel 2 Orisinalitas Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2015	Dovan Ramandha, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Revitalisasi untuk perpajakan vila di kawasan wisata songgoriti kota batu	1. apa saja kendala dinas pendapatan Kota Batu dalam menerapkan sistem pajak yang benar pada pemilik villa di kawasan wisata songgoriti ? 2. Bagaimana sistem perpajakan yang benar yang seharusnya diterapkan para pemilik villa di kawasan wisata songgoriti ?	Skripsi
2	2014	Arif Fahmi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta	1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta ? 2. Hambatan apa saja yang ditemui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan	Skripsi



				Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta?
--	--	--	--	---

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu mengenai implementasi kebijakan pengembangan kawasan Kota Batu sebagai sentra agrowisata (Studi Implementasi Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata) yang didalamnya terdapat program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian masyarakat sekitar Kota Batu.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan metode penelitian hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah juga pengambilan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisi tentang teori-teori, doktrin, atau pendapat sarjana kajian yuridis berdasarkan ketentuan yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan dalam penulisan hukum.



### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijabarkan mengenai metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisis dari penulis terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian dan didukung dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.

### **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan tujuan akhir dari penelitian skripsi ini dan kesimpulan merupakan landasan untuk mengembangkan saran-saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.<sup>1</sup>

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Winarno, F.G., *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal.101

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 102



Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain).<sup>3</sup>

Definisi lainnya menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah "Suatu wilayah atau bidang tertentu dari tindakan-tindakan pemerintah sebagai subyek telaah perbandingan dan telaah yang kritis, yang meliputi antara lain berbagai tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis secara cermat kemungkinan hubungan sebab dan akibat dalam konteks suatu disiplin berfikir tertentu semisal ekonomi, sains atau politik" (Parker, *ibid*). Pada pihak lain, kebijakan publik sebagai "semua pilihan atau tindak yang dilakukan oleh pemerintah". Oleh sebab itu, dari sudut pandang Dye, kebijakan publik itu menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Iskandar, U., dan A. Nugraha. 2004. *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak*. Yogyakarta: Debur Press, hal .47

<sup>4</sup> Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, N.J: Englewood Cliffs, hal.



Dari beberapa pengertian diatas, penulis sependapat dengan Van Meter dan Van Horn, bahwa Implementasi kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

### 1. Aktor dan Pelaku Pembuat Kebijakan Publik

Aktor dan pelaku pembuatan kebijakan adalah siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan publik dan dengan cara apa atau faktor-faktor apakah kebijakan publik dapat dipengaruhi. Actor pembuat kebijakan publik dibagi menjadi dua yakni pejabat pembuat kebijakan dan partisipan non pemerintahan.<sup>5</sup>

#### a. Pejabat Pembuat Kebijakan

Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik walau dalam kenyataannya, beberapa orang yang mempunyai wewenang sah untuk bertindak dikendalikan oleh orang lain,

<sup>5</sup> Agustino, L, Dasar-dasar kebijakan publik, Bandung: CV. Alfabeta, 2014, hal 28



seperti pimpinan partai politik, atau kelompok penkan. Yang termasuk dalam pembuat kebijakan, secara normatif adalah: legislatif, eksekutif, administrator, dan para hakim. Masing-masing mempunyai tugas dalam pembuatan kebijakan yang relatif berbeda dengan lembaga lainnya.

Sangat penting dalam konteks ini untuk membedakan antara pembuat kebijakan primer dan pembuat kebijakan suplemen/sekunder/ pendukung. Pembuat kebijakan primer adalah aktor-aktor atau *stakeholder* yang mempunyai wewenang konstitusional langsung untuk bertindak; misalnya, wewenang bertindak di parlemen yang tidak harus bergantung pada unit pemerintah lainnya. Sedangkan pembuat kebijakan suplemen/sekunder/pendukung, seperti: instansi administrasi, harus mendapat wewenang untuk bertindak dari lembaga yang lainnya (pembuat kebijakan primer) dan karena itu, paling tidak secara potensial, ia tergantung atau dapat dikendalikan oleh mereka (pembuat kebijakan primer).

Pembahasan tentang pejabat pembuat kebijakan berikut di bawah ini dimaksudkan hanya sebagai gambaran umum, yaitu untuk menyampaikan gagasan mengenai tugas umum mereka dalam pembentukan kebijakan, bukan untuk mendaftar semua kekuasaan dan aktifitasnya melalui tupoksi-nya.

#### b. Legislatif

Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam system politik. Hal ini tidak berarti bahwa hanya karena legislatif ditunjuk secara



formal, maka mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Penetapan keputusan politik menjadi kebijakan publik merupakan sesuatu yang harus ditentukan melalui rangkaian kegiatan empiris yang runut dan sistematis. Kesimpulan umum secara global adalah legislatif lebih berperan dalam pembentukan kebijakan di negara-negara demokratis daripada di negara-negara otoriter.

#### c. Eksekutif

Banyak analisis yang mengatakan bahwa saat ini kita hidup dalam sebuah era yang disebut *exsecutive-center era*, dimana efektifitas pemerintah, selaku lembaga eksekutif secara substansial tergantung pada kepemimpinan eksekutif, baik dalam pembentukan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Di Amerika Serikat sering mengharapakan presiden, selaku pemimpin pemerintah untuk mengajukan dan menyajikan usulan-usulan perundang-undangannya bagi kemajuan republik ke depan. Di negara-negara berkembang, lembaga eksekutif selalu berpengaruh dalam pembuatan kebijakan daripada lembaga legislatif. Secara sederhana, struktur pembuat kebijakan di negara-negara berkembang hanya terletak pada pundak eksekutif selaku pembuat kebijakan itu sendiri.

#### d. Instansi Administratif

Sistem administrasi di seluruh dunia dibedakan berdasarkan karakteristiknya, seperti ukuran dan keragaman, hirarkisitas organisasi, hingga tingkat otonominya. Instansi administrasi merupakan sumber utama usulan perundang-undangan dibuat dalam sistem politik.



### e. Lembaga Peradilan

Pengadilan atau lembaga peradilan yang berwenang dalam proses banding seringkali dipengaruhi oleh sifat dan isi kebijakan publik melalui penggunaan kekuasaan pengadilan untuk meninjau dan menginterpretasi undang-undang dalam kasus yang dibawa sebelumnya. Tinjauan hukum merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan hukum bagi kegiatan legislatif dan cabang-cabang eksekutif serta mengumumkan pembatalan dan tidak berlakunya bila didapati kegiatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

## 2. Dampak Implimentasi Kebijakan

Setiap kebijakan pasti memiliki output kebijakan. *Output* kebijakan adalah sesuatu biasanya berupa benda yang dikerjakan pemerintah (seperi: konstruksi jalan, program pembayaran kesejahteraan pada masyarakat, atau bantuan operasional sekolah, dan lain-lain). Aktivitas kegiatan tersebut diukur dengan standarisasi yang jelas. Hal semacam ini sedikit memberikan gambaran pada kita tentang hasil, atau dampak, dari kebijakan publik, karena dalam usaha untuk menentukan hasil kebijakan, perhatian kita adalah dalam perubahan dilingkungan sekitarnya atau sistem politik yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan. Sedangkan *outcome* kebijakan lebih memfokuskan atau mencoba untuk menentukan pengaruh dari kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya. Kalimat “berupaya dan mencoba untuk menentukan” dimaksudkan untuk memahami dampak



atau pengaruh yang terjadi dari diberlakukannya kebijakan. Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi yaitu:<sup>6</sup>

- a. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berbungan dan melibatkan masyarakat. Pertama-tama harus didefinisikan siapa yang akan terkena pengaruh kebijakan; apakah orang miskin, pengusaha kecil, produsen minyak, anak sekolah, guru, atau siapa; Kedua, perlu kiranya ditentukan dampak kebijakan yang dimaksud.

Jika ada program atau proyek anti kemiskinan (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, P2KP, misalnya); apa tujuannya; Apakah memberikan pendapatan bagi kaum iskin, atau meningkatkan kesempatan bekerja mereka, atau untuk mengubah sikap dan perilaku mereka? Jika kombinasi dari tujuan seperti itu

diberikan, maka analisis menjadi lebih rumit karena prioitas harus diberikan padapengaruh yang bermacam-macam. Lebih jauh lagi, harus dicatat pula bahwa kebijakan dapat mempunyai akibat yang diharapkan atau yang tidak diharapkan, atau bahkan keduanya.

Suatu program kesejahteraan dapat pasti meningkatkan pendaatan dri kelompok yang diuntungkan, seperti yang diharapkan, tetapi

apakah ada pengaruhnya pada kelompok ini? atau apakah hal ini justru akan mengurangi keuntungan masyarakat lain? Suatu program perumahan rakyat, misalnya, dapat meningkatkan keadaan

perumahan masyarakat, tetapi program ini juga dapat menimbulkan masalah atas perbedaan perlakuan. Suatu program pendukung

<sup>6</sup> Agustino, L, Ibid Hal 28



pertanian, yang bermaksud untuk meningkatkan pendapatan petani, dapat menimbulkan produksi hasil pertanian tertentu yang berlebihan, atau data juga menimbulkan harga makan yang lebih tinggi bagi konsumennya. Hal-hal tersebut di muka akan berimplikasi pada dimensi lain; dimensi kedua di bawah.

b. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain: atau dapat disebut juga eksternalitas atau *spillover effect*. Uji coba bahan peledak nuklir di atmosfer dapat memberikan data yang diinginkan untuk pengembangan pembuatan senjata, tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya pada warga asyaaakat dunia. Hal tersebut di atas akan berdampak eksternalitas yang negatif, walau disisi lain ada pula dampak eksternal positifnya.

c. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini. Pertanyaan yang sering muncul dalam konteks ini, ialah: apakah kebijakan dibuat untuk situasi jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang? Apakah program pengendalian harga dimaksudkan hanya untuk meneliti kenaikan harga yang baru terjadi, atau dimaksudkan untuk memberikan pengaruh jangka panjang pada perilaku ekonomi, seperti mengurangi laju inflasi.

d. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya. Seperti biaya sering tidak dipertimbangan dala pembuatan



evaluasi kebijakan, setidaknya sebagian ada yang menentang penghitungannya.

### 3. Perspektif Teoritik Implementasi Kebijakan

Ciri penting lain dari kebijakan adalah tingkat konflik atau konsensus atas tujuan dan sarannya. Ciri ini dilihat dari sejauh mana para pejabat yang melaksanakan kebijakan mempunyai kesepakatan terhadap tujuan-tujuan dan saran-saran program. Konsensus mungkin tidak akan terjadi bila tindakan-tindakan yang berdasarkan nilai dari para pejabat dan pemimpin menjadi faktor yang paling menentukan bagi kebijakan akhir.

Dalam meninjau kembali literatur tentang perubahan organisasi yang terencana, Gross dan kawan-kawan mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi konsensus tujuan. Salah satu dari faktor-faktor ini adalah sejauh mana para pejabat bawahan (*implementors*) berperan serta dalam pembuatan keputusan kebijakan. Resensi iteratif mereka memperoleh dukungan bagi argumen-argumen berikut: (1) peran serta menimbulkan semangat staf yang tinggi dan semangat staf yang tinggi diperlukan bagi implementasi yang berhasil; (2) peran serta menimbulkan komitmen yang besar dan tingkat komitmen yang tinggi diperlukan untuk mempengaruhi perubahan; (3) peran serta menimbulkan kejelasan yang lebih besar tentang suatu pembaruan dan kejelasan diperlukan untuk implementasi; (4) dengan menggunakan postulat resistensi dasar terhadap perubahan, argumen yang dibangun kemudian adalah bahwa peran serta akan mengurangi resistensi awal dan dengan demikian memudahkan implementasi yang berhasil; dan (5) para pejabat bawahan akan cenderung menentang suatu pembaruan jika



prakarsa atas pelaksanaan kebijakan semata-mata berasal dari pejabat yang menjadi atasan mereka. Dengan demikian, peran serta menjadi faktor yang krusial bagi keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan. Namun demikian, suatu hal yang harus digarisbawahi di sini adalah kita tidak dapat memperdebatkan bahwa peran serta pejabat-pejabat bawahan dalam pembuatan keputusan perlu menghasilkan konsensus tujuan. Selain itu, kita juga tidak dapat menyimpulkan bahwa masalah-masalah implementasi dapat dihilangkan sekali konsensus tujuan dicapai.

#### 4. Model Proses Implementasi Kebijakan

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *top down* dan *bottom up*. Dalam bahasa istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*).<sup>7</sup> Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.<sup>8</sup>

Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya, dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak ppada asumsi-asumsi yang

<sup>7</sup> Lester, James P dan Joseph Stewart Jr. 2000. *Public Policy; in Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth, 200, hal 108

<sup>8</sup> Opcit Agustino Hal 140



sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya.

Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Fokus analisis implementasi berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street-level-bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan. Berangkat dari perspektif tersebut, maka timbulah pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut: 1) sampai sejauh mana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengan keputusan kebijakan tersebut? 2) sejauhmanakah tujuan kebijakan tercapai? 3) Faktor-faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi *output* dan dampak kebijakan?, serta 4) Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman lapangan.

Empat pertanyaan tersebut mengarah pada inti sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan di level pusat. Fokus tersebut membawa



konsekuensi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Beberapa *scholar* yang menganut aliran *top down*, diantaranya, adalah: Donal Van meter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, George Edward III, serta Merilee S. Grindle. Dibawah ini akan dipaparkan secara ringkas ide-ide sdasar yang disampaikan oleh keempat *scholar* tersebut dalam menjelaskan terapan implementasi kebijakan yang mereka teoremakan.

## 5. Pariwisata

Menurut *Richard Sihite* dalam<sup>9</sup> menjelaskan definisi pariwisata sebagai berikut : Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Marpaung dan Bahar. "Pengertian Pariwisata". Artikel tersedia <http://manadoinblog.wordpress.com/2012/03/22/definisi-pariwisata-menurut-beberapa-ahli/> (di unduh 04 mei 2012), 2000, hal 46-47

<sup>10</sup> Kodhyat, H. 1983. *Pengertian Pariwisata dan Kepariwisataaan*. Yogyakarta. Hal 4



Definisi pariwisata, yaitu pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.<sup>11</sup>

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain.<sup>12</sup> Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.<sup>13</sup>

Pariwisata berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap.<sup>14</sup>

Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "travel" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata "Pariwisata" dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang

<sup>11</sup> Wahab, S. 1975. *Definisi pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal 55

<sup>12</sup> Spillane J.J.1982. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.150 halaman.Utama. Jakarta, hal. 20

<sup>13</sup> Burkart, A.J. dan Medlik, S. 1987. *Tourism, Past, Present, and Future*. London

<sup>14</sup> Yoeti, O. A. 1994. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa hal 103



dalam bahasa Inggris disebut dengan "Tour"<sup>15</sup> Ciri-ciri pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang melakukan perjalanan dan keluar meninggalkan tempat tinggalnya.
- b. Perjalanan itu dilakukan keluar jauh dari lingkungan tempat tinggalnya yang semula.
- c. Perjalanan itu dilakukan sendirian atau bersama-sama dengan orang lain (rombongan atau group).
- d. Perjalanan itu dilakukan hanya untuk sementara waktu dan bisa melebihi waktu 24 jam atau sehari-semalam penuh.
- e. Perjalanan itu terkait dengan kegiatan atau rekreasi, atau usaha menyenangkan dirinya.
- f. Orang-orang yang melakukan perjalanan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.
- g. Selama dalam perjalanan tinggal di suatu tempat/akomodasi.
- h. Dalam melakukan perjalanan, melalui alat transportasi laut, darat atau udara.

## 6. Kegiatan Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal

<sup>15</sup> Ibid hal. 106



asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan.

Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula.<sup>16</sup> Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya.

Heriawan<sup>17</sup> mengomentari uraian tersebut memiliki pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata. Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup jauh dari segi jarak tentu bukan termasuk kategori wisatawan. Dengan kata lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (*leisure*) yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.

## 7. Peran Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya. Diantara sekian banyak aspek tersebut, aspek yang mendapat perhatian yang paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap sangat penting adalah aspek ekonomisnya.

<sup>16</sup> Heriawan. 2004. *Peranan dan Dampak Pariwisata Pada Perekonomian Indonesia: Suatu Model Pendekatan Model I-O dan SAM*. Thesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Hal. 85

<sup>17</sup> Ibid hlm. 89

Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berperan atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berperan serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.

Pembangunan di sektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat.

Peranan pariwisata saat ini antara lain adalah: pertama, peranan ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua, peranan sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah peranan kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian<sup>18</sup>. Ketiga *point* diatas dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut :

a. Peran Ekonomi

- 1) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata,

<sup>18</sup> Hutabarat,S dan Evans,S,1992. *Pengantar Oseanografi*, Penerbit UI – Press, Jakarta





angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.

2) Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, *homestay*, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

#### b. Peran Sosial

Semakin luasnya lapangan kerja. Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.



### c. Peran Kebudayaan

1) Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah. Indonesia

memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan.

2) Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup. Kekayaan dan keindahan

alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata. Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata. - Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli. Hal ini merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli untuk diperlihatkan kepada wisatawan.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiah agar dapat dipertanggung-jawabkan oleh peneliti. Hal ini akan terwujud jika didukung dengan ketepatan alat untuk meneliti sebuah masalah. Alat tersebut adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir penelitian, dan untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung dengan strategi penggunaan berbagai metode pengumpulan data, yang disebut metodologi, agar penelitian tersebut mencapai tingkat keandalan dan kesahihan.<sup>1</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan kawasan Kota Batu sebagai sentra wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Studi Implementasi Perda Kota Batu No.1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan).

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yang bertujuan untuk menganalisa

<sup>1</sup> Sulistyio-Basuki, 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia



permasalahan yang muncul dari penelitian ini tentang implementasi kebijakan. Apakah suatu kebijakan sudah baik atau belum

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu. Alasan pemilihan lokasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu karena Dinas yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkaitan dengan pengembangan sektor wisata Kota Batu. Berdasarkan pra survey yang dilakukan oleh penulis bulan September 2015, Kota Batu sangat berpotensi dalam hal wisata guna peningkatan perekonomian daerah, namun tidak diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perekonomian daerah Kota Batu.

### D. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti melalui wawancara dari narasumber, yakni informan yang memberikan data berupa kata-kata atau tindakan dan mengerti mengenai masalah yang sedang diteliti yaitu tentang implementasi kebijakan pengembangan kawasan wisata Kota Batu berdasarkan Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013.

Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah



yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan kegiatan pengembangan hasil pelaksanaan program yang dimiliki dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Batu.

### **E. Sumber Data**

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dinas pariwisata dan kebudayaan kota batu untuk selanjutnya diolah oleh penulis.

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen tentang implementasi kebijakan publik terutama pengembangan kawasan agrowisata yang ada di perpustakaan kota Malang, perpustakaan umum kota batu dan pusat dokumentasi ilmu hukum fakultas hukum universitas brawijaya.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Data Primer**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya tentang

<sup>2</sup> Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, Surabaya: Unesa University Press, 2005



strategi pengembangan kapasitas melalui pedoman wawancara yang telah disusun.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang mendukung fokus penelitian, dengan mengambil data sekunder di antaranya data yang berbentuk laporan-laporan kegiatan pengembangan hasil pelaksanaan program yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Batu.

## G. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata kota batu. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota Batu. Yang dalam hal ini diwakilkan oleh K. Latief Setiawan, SH. selaku Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. teknik penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan



dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh kemudian diolah untuk menjawab pertanyaan Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan Kota Batu sebagai sentra agrowisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan Pasal 5 Huruf e Perda Kota Batu No.1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Apa saja Faktor Penghambat implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ?

### **I. Definisi Operasional**

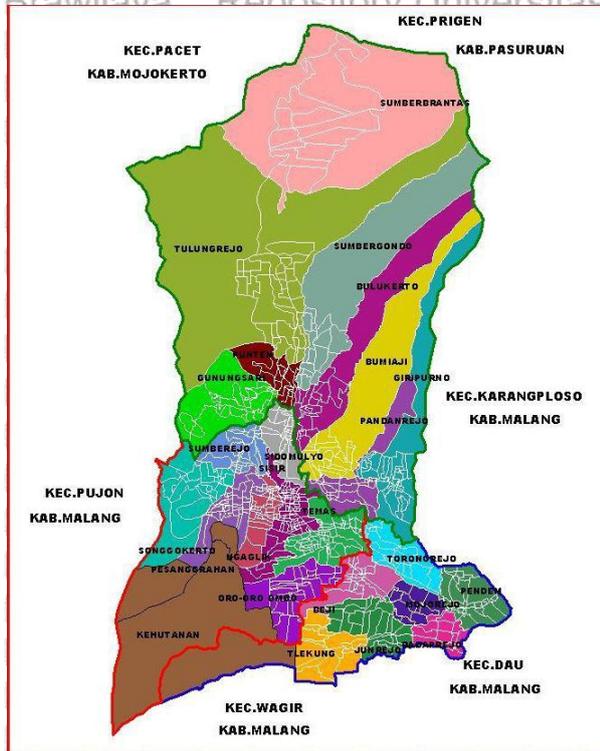
1. Implementasi kebijakan adalah suatu kebijakan yang harus dilaksanakan atau diimplementasikan untuk mencapai suatu tujuan dengan sarana-sarana tertentu.
2. Pariwisata adalah kegiatan-kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kemandirian masyarakatnya.

<sup>3</sup> Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kota Batu



Gambar 1

Ditinjau dari letak astronomi, Kota Batu terletak diantara  $122^{\circ} 17' - 122^{\circ} 57'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 44' - 8^{\circ} 26'$  Lintang Selatan. Kota Batu merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 15 km yang berbatasan langsung dengan Kota Malang, dan berada diantara jalur Malang dan Kediri serta Malang dan Jombang. Kota Batu mempunyai peran yang sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian, khususnya dalam skala wilayah Malang Raya dan



umumnya dalam skala wilayah Jawa Timur, yaitu sebagai sentra pariwisata Jawa Timur.<sup>1</sup>

Wilayah Kota Batu merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan dengan iklim yang sejuk. Potensi utama Kota Batu adalah pada sektor pariwisata dan sektor pertanian khususnya pertanian hortikultura.

Fungsi kawasan kota Batu meliputi areal permukiman, perdagangan dan jasa, pergudangan, perindustrian, fasilitas umum, kawasan militer, kawasan wisata, areal pertanian, ruang terbuka hijau serta hutan. Adapun untuk penggunaan lahan di Kota Batu didominasi oleh lahan pertanian seluas 11.265,64 hektar dari luas keseluruhan lahan.

#### 1. Perbatasan Wilayah

Ditinjau dari astronomi, Kota Batu terletak diantara  $122^{\circ}17'$  sampai dengan  $122^{\circ}57'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}44'$  sampai dengan  $8^{\circ}26'$  Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Blitar dan Malang
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Malang
- e. Luas Wilayah

Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 199,09 Km<sup>2</sup> terbagi ke dalam 3 kecamatan dan Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas dibandingkan dua kecamatan lainnya. Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 862 m di atas

<sup>1</sup> Gambaran umum Kota Batu, <http://google.com> diakses tanggal 16 Januari 2016



permukaan laut. Dilihat dari ketinggian wilayahnya, sebagian besar daerah di Kota Batu terletak di daerah perbukitan/lereng.

Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya yaitu 12.797,89 ha sedangkan Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo masing-masing luas wilayahnya 4.545,81 ha dan 2.565,02 ha. Dilihat dari keadaan geografinya, Kota Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah.

Pertama jenis tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua jenis Kambisol, berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Ketiga tanah alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. Dan yang terakhir jenis tanah Latosol meliputi Batu seluas 260,34 ha,<sup>2</sup> Kecamatan Junrejo 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 ha.

Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan, 24 desa /kelurahan, 231 RW dan 1.092 RT. Dilihat komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu masing-masing 9 desa/kelurahan. Banyaknya jumlah desa/kelurahan yang dimiliki tidak otomatis menjadi daerah dengan jumlah RW dan RT terbanyak pula.

<sup>2</sup> Gambaran umum Kota Batu, <http://google.com> diakses tanggal 16 Januari 2016



Terbukti jumlah RW dan RT terbanyak di Kecamatan Batu yaitu masing-masing 91 RW dan 427 RT. Berikutnya Kecamatan Bumiaji 81 RW dan 426 RT dan sisanya berada di Kecamatan Junrejo. Sekretariat Pusat Paguyuban Darma Bakti yang diteliti dalam skripsi ini ada di Kelurahan Songgokerto, Dusun Tambuh, Kecamatan Batu. Berikut ini tabel jumlah desa dan/atau kelurahan, RW dan RT Kota Batu:

**Tabel 3 Jumlah Desa/Kelurahan, RW dan RT per Kecamatan di Kota Batu**

No.	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Kelurahan	Desa	RW	RT
1	Batu	Kel. Sisir Kel. Ngagglik Kel. Songgokerto Kel. Temas Ds. Sanggrahan Ds. Sumberjo Ds. Sidomulyo Ds. Oro-oro Ombo	4	4	91	430
2	Junrejo	Kel. Dadarejo Ds. Pendem Ds. Junrejo Ds. Beji Ds. Torongrejo	1	6	59	239

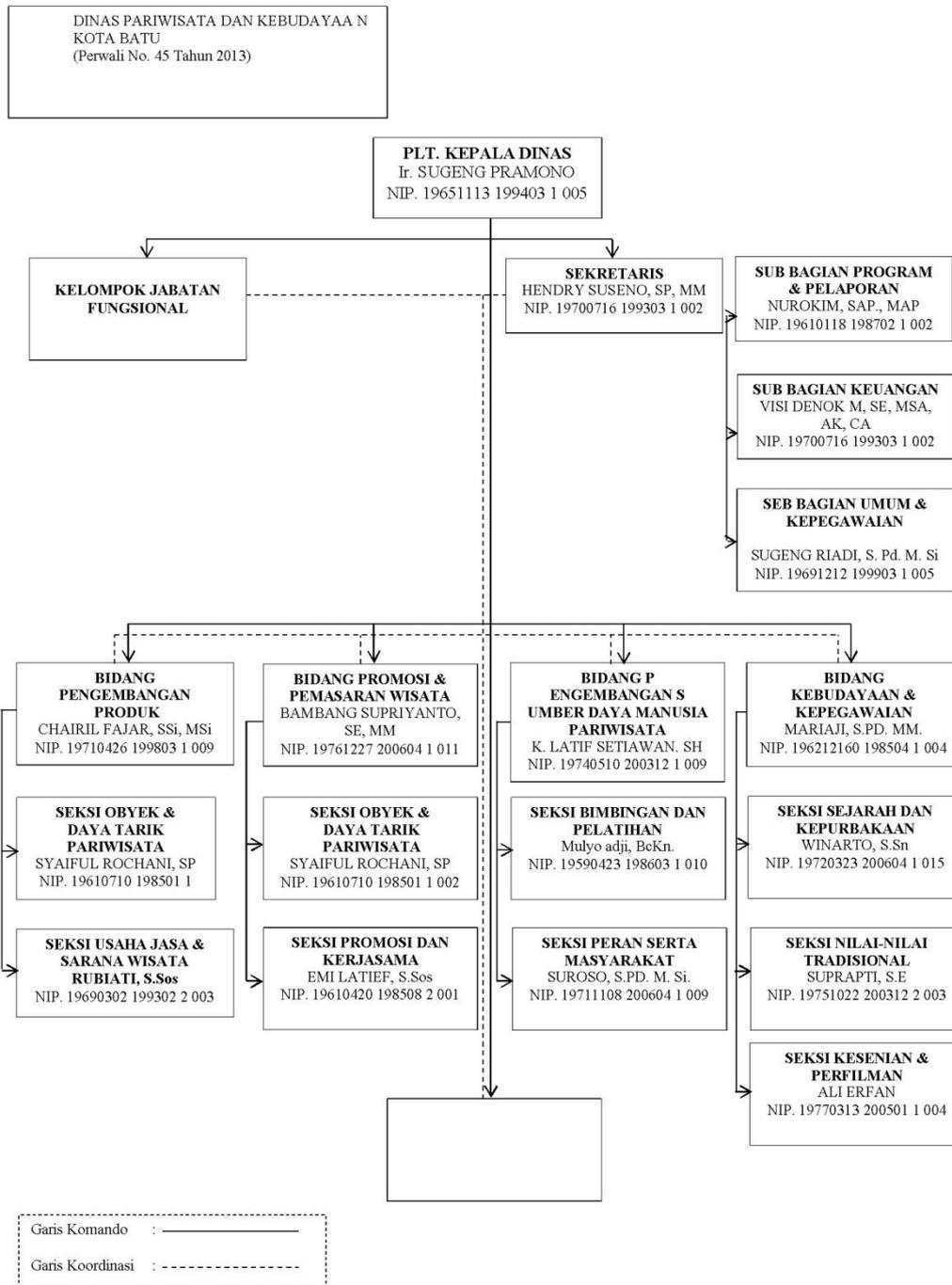


		Ds. Tlekung				
		Ds. Mojoirejo				
3	Bumiaji	Ds. Sumberbratas	9	81	426	
		Ds. Tulungrejo				
		Ds. Punten				
		Ds. Sumbergondo				
		Ds. Gunungsari				
		Ds. Bulukerto				
		Ds. Pandanrejo				
		Ds. Bumiaji				
		Ds. Giripurno				
Jumlah			5	19	231	1095

Sumber data: BPS Kota Batu

## B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

### 1. Struktur Organisasi Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu



Gambar 2



## 2. Penjabaran Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, yaitu:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- 2) perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 3) perencanaan dan pengendalian anggaran;
- 4) pengendalian urusan administrasi Dinas;
- 5) pembinaan pengembangan produk pariwisata;
- 6) pembinaan promosi dan pemasaran pariwisata;
- 7) pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 8) pembinaan pengembangan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah, dan purbakala.
- 9) penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan, serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
- 10) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama bidang pariwisata dan kebudayaan



di antara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;

11) penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

dan

12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan rencana kerja Dinas, mengendalikan administrasi keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan rencana kerja Sekretariat;
- 2) pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- 3) pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas;
- 4) pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- 5) pembinaan dan pengembangan pegawai;
- 6) pengendalian data informasi basil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- 7) pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKCM); dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



c. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
- 2) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- 3) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RICA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- 4) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 5) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 6) penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 7) pengelolaan data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola anggaran dan administrasi keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub



Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
- 2) pelaksanaan verifikasi SPP;
- 3) penyiapan Surat Perintah Membayar;
- 4) pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- 5) penyusunan laporan keuangan Dinas;
- 6) penyusunan administrasi dan teknis pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola ketatalaksanaan dan ketatausahaan, meliputi administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga, barang milik daerah, perpustakaan, dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
- 2) pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
- 3) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 4) pengelolaan kehumasan dan keprotokolari;
- 5) pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;



- 6) pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
  - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan pengembangan produk pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan rencana kerja Bidang;
- 2) penyusunan pedoman teknis program kegiatan pengembangan produk pariwisata;
- 3) pembinaan potensi usaha kepariwisataan;
- 4) pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum;
- 5) pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek serta daya tarik wisata; pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;
- 6) pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan



tugas dan fungsinya.

g. Seksi Obyek dan Daya Tank Pariwisata mempunyai tugas menyusun rencana, mengolah data, membina, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengembangan objek dan daya tank pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pendataan dan pemetaan informasi potensi daya tank wisata, atraksi wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
- 3) pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pengembangan objek dan daya tank wisata, atraksi wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
- 4) pelaksanaan fasilitasi teknis kerja sama perusahaan objek dan daya tank wisata, serta rekreasi dan hiburan umum;
- 5) pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis penataan dan pelestarian lingkungan bagi usaha objek dan daya tank wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi usaha jasa dan sarana wisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha



Jasa dan Sarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pendataan dan pemetaan data informasi usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman penunjang pariwisata, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) usaha jasa pariwisata;
- 4) pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman penunjang pariwisata, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;
- 5) penyusunan rekomendasi persyaratan administrasi dasar klasifikasi hotel dan restoran usaha makanan dan minuman penunjang pariwisata, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;
- 6) pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerja sama kemitraan usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;
- 7) pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengembangan Produk Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- i. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan



kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang

Promosi dan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan rencana kerja Bidang;
- 2) penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan promosi, pemasaran, dan kerja sama kebudayaan dan pariwisata;
- 3) perumusan Rencana Induk Pengembangan pariwisata (RIPP) skala daerah;
- 4) pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata;
- 5) pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata;
- 6) pembinaan pameran/ *event* kebudayaan dan pariwisata;
- 7) pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata;
- 8) perumusan *branding* (merek) dan *tagline* (slogan) pariwisata;
- 9) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Seksi Informasi dan Analisa Pasar mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan informasi pariwisata dan analisa pasar pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Informasi dan Analisa Pasar menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pendataan *dan* pemetaan data informasi pariwisata dan analisa pasar pariwisata;
- 3) penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP);



- 4) pengelolaan teknis manajemen sistem informasi pariwisata;
- 5) pengelolaan pusat pelayanan informasi pariwisata;
- 6) penyusunan analisis pasar kebudayaan dan pariwisata;
- 7) pelaksanaan fasilitasi pengembangan potensi pasar pariwisata baik dalam maupun luar negeri;
- 8) pengelolaan survey potensi budaya dan pariwisata;
- 9) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Seksi Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring dan evaluasi program kegiatan promosi kepariwisataan dan Kerja Sama pariwisata dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pendataan dan pemetaan data informasi pariwisata lokal dan unggulan serta kerja sama pemasaran wisata;
- 3) penyusunan pedoman teknis pengembangan promosi dan destinasi wisata;
- 4) pelaksanaan fasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional pengembangan destinasi wisata;
- 5) pengelolaan teknis kegiatan pameran/ *event* budaya dan pariwisata;
- 6) pengelolaan teknis administrasi penetapan *branding* (merek) pariwisata



dan *tagline* (slogan) pariwisata;

- 7) pelaksanaan fasilitasi program pertukaran budaya dan pariwisata;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan rencana kerja Bidang;
- 2) penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 3) pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 4) penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
- 5) penyusunan teknis kerja sama dengan instansi terkait di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



m. Seksi Bimbingan dan Pelatihan mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pendataan dan pemetaan data informasi potensi dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 3) pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan;
- 4) pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis sanggar, organisasi, dan pelaku seni dan budaya;
- 5) pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis kompetensi profesi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

n. Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pengembangan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;



2) pendataan dan pemetaan data informasi potensi peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;

3) pelaksanaan fasilitasi pembinaan program masyarakat sadar wisata;

4) pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pengembangan sumber daya masyarakat pariwisata;

5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan

6) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan rencana kerja Bidang;

2) penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan kebudayaan, keparibakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;

3) penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional di bidang kebudayaan, keparibakalaan, nilai tradisional, kesenian, perfilman dan sejarah;

4) pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan, keparibakalaan, nilai tradisional, kesenian, perfilman dan sejarah;

5) pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;

6) pengendalian perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, Benda Cagar



Budaya (BC13), dan sites warisan budaya;

- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

p. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pembinaan dan perlindungan nilai-nilai sejarah dan keurbakalaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pendataan dan pemetaan data informasi peninggalan sejarah, keurbakalaan dan budaya daerah;
- 3) penyusunan pedoman penelitian arkeologi dan pengelolaan museum;
- 4) pengelolaan data inventarisasi dan dokumentasi sumber dan publikasi sejarah dan keurbakalaan;
- 5) pelaksanaan fasilitasi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
- 6) pengelolaan sistem informasi geografi sejarah;
- 7) pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) situs warisan budaya daerah dan hasil pengangkatan peninggalan bawah air;
- 8) pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pemahaman nilai keurbakalaan bagi masyarakat;
- 9) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan



sesuai dengan tugas dan fungsinya.

q. Seksi Nilai-Nilai Tradisional mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan perlindungan nilai-nilai tradisional daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Nilai-Nilai Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pendataan dan pemetaan data informasi potensi pengembangan nilai-nilai tradisional daerah;
- 3) pelaksanaan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan;
- 4) pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis terhadap lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

r. Seksi Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pembinaan dan perlindungan nilai-nilai kesenian dan perfilraan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesenian dan Perfilman menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan. Seksi;
- 2) pendataan dan pemetaan data informasi potensi pengembangan kesenian dan perfilman;



- 3) pelaksanaan fasilitasi kegiatan festival kesenian, pameran dan lomba di bidang kesenian;
- 4) pengelolaan administrasi ijin usaha pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film kerening, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan;
- 5) pengawasan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video;
- 6) pengelolaan administrasi ijin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian dan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri;
- 7) pengelolaan aset/benda kesenian;
- 8) pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
- 9) pelaksanaan fasilitasi perumusan kriteria system pemberian penghargaan/ anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kesenian;
- 10) pengelolaan teknis administrasi penetapan Nomor Induk Kesenian bagi seniman dan organisasi kesenian;
- 11) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Peraturan Walikota Batu Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu



#### **D. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, tentang kepariwisataan, pasal 1 angka 3 menyebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata yang dimaksud dalam hal ini adalah pariwisata Kota Batu. Adapun Kota Batu adalah salah satu kota wisata yang berada di Jawa timur yang memiliki banyak daya tarik untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kota Batu. Kota Batu dengan segala kelebihan potensi yang dimiliki hendaknya tetap memperhatikan perekonomian masyarakatnya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Kota Batu. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut; memberdayakan masyarakat setempat. Pemerintah Daerah Kota Batu hendaknya melaksanakan Peraturan Daerah dengan maksimal terkait pemberdayaan terhadap masyarakat setempat.

Terkait dengan implementasi kebijakan pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013, penulis menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah



ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dinas yang berwenang dalam hal implementasi kebijakan pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat setempat sangat penting untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Batu. Sesuai hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, dalam pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kota Batu melaksanakan beberapa rencana kegiatan, seperti, menggunakan sarana promosi dan pengembangan produk wisata. Karena Kota Batu sebagai Kota Agrowisata yang membagi 3 Kecamatan sesuai potensi dari masing-masing kecamatan di Kota Batu.

Kecamatan Batu banyak wisata buatan, Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Junrejo wisata petik apel, stroberi, kentang. Selanjutnya, strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu melakukan perencanaan top down,



yakni adanya sebutan “pokdarwis”: pokdarwis adalah kelompok sadar wisata. Yakni pemerintah Kota Batu memprogramkan desa-desa untuk membuat kelompok sadar wisata guna mendukung program pemerintah kota batu sebagai kota agrowisata.

Setiap desa memiliki potensi agrowisata diharapkan memiliki “pokdarwis”, “pokdarwis” seharusnya ada di 19 desa dan 5 kelurahan. Namun dalam kenyatannya, yang berjalan tidak sampai 30% desa yang memiliki “pokdarwis” dan tidak semuanya sukses melaksanakan program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka Kota Batu sebagai Kota Agrowisata dan pemberdayaan bagi masyarakat setempat.

Pemerintah Daerah Kota Batu sangat membutuhkan masukan dari masyarakat untuk pembangunan wisata di setiap daerahnya. Pemerintah akan berusaha menampung semua aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan tiap-tiap desa untuk wisata. Pemerintah Kota Batu juga telah memfasilitasi Musyawarah Bank Desa, Musyawarah Bank Kecamatan, dan pembangunan infrastruktur yakni Irigasi Desa untuk kelancaran dibidang pertanian dimasing-masing desa.

Analisis implementasi Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut;

### **1. Penyelenggaraan Kepariwisataaan Kota Batu**

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dan berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu



memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha di sektor formal dan informal, peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai pajak dan retribusi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer”, dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya.

Kota Batu memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang merupakan modal yang perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, serta mengangkat citra daerah.

Keberadaan Kota Batu sebagai kota pariwisata sudah lama dikenal oleh masyarakat umum karena sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki. Kota Batu menjadi kota tersendiri sejak tahun 2001 dan tergolong



maju sebagai kota berbasis agrowisata. Banyak orang berkunjung ke kota ini untuk berwisata dan menikmati indahnya pemandangan. Kunjungan wisata ini terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang semakin pesat. Karenanya, pemerintah daerah harus melakukan strategi-strategi khusus untuk melaksanakan tujuan pemerintah daerah Kota Batu sebagai Kota Agrowisata.

Adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam pengaturan penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Batu, bahkan Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Undang-undang demi terciptanya Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Batu lebih baik dan terarah. Dan Kota Batu telah membuat Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kepariwisata sebagai pedoman daerah dalam melaksanakan tujuannya.

Adanya peraturan daerah tersebut telah menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Batu telah serius membenahi Kota Batu menjadi kota yang berbasis agrowisata.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang meliputi, antara lain prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, kawasan strategis pariwisata dan desa wisata, jenis usaha pariwisata berikut pendaftarannya, wewenang pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, kelembagaan pariwisata, pelatihan dan penyuluhan di bidang pariwisata, standardisasi usaha dan sertifikasi tenaga kerja, tenaga kerja ahli warga asing, serta peran serta masyarakat.



Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Kota Batu diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Manfaat;
2. Kekeluargaan;
3. Adil dan merata;
4. Keseimbangan;
5. Kemandirian;
6. Kelestarian;
7. Partisipatif;
8. Berkelanjutan;
9. Demokratis;
10. Kesetaraan; dan
11. Kesatuan.

Selanjutnya Penyelenggaraan Kepariwisataaan Kota Batu berdasarkan pasal 3, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. pemererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

Pembangunan pariwisata Kota Batu mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat karena dengan berkembangnya sektor pariwisata mendorong pertumbuhan sektor hilir agribisnis mencakup agroindustri pedesaan, industri manufaktur, makanan, pelayanan kebutuhan restoran hotel-hotel hingga outlet – outlet agribisnis maupun toko oleh – oleh cinderamata.<sup>4</sup>

Dalam rangka mengetahui keberlanjutan pengembangan kawasan agropolitan

<sup>4</sup>Sabil, Q. 2008. Kajian Kelembagaan. Agroindustri Pangan Olahan di Kawasan – Kawasan Agropolitan Kota Batu Propinsi Jawa Timur. Thesis. IPB. Bogor. 130p



di Kota Batu perlu dilakukan studi keberlanjutan pengembangan kawasan agropolitan yang meliputi tiga kecamatan di Kota Batu. Pengembangan kawasan kota Batu difokuskan pada dua aspek yaitu pengembangan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata.

Pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu terdapat pada beberapa kawasan pertanian yang kondisi fisik, sosial budaya dan ekonominya cenderung kuat mengarah ke kegiatan pertanian.<sup>5</sup> Keberadaan gunung, hutan, dan hamparan pertanian yang mendominasi Kota Batu, sangat sesuai untuk pengembangan wisata alam terkait dengan potensi yang ada di gunung, hutan, dan kawasan pertaniannya. Selain itu sebagai kota yang dikenal dengan komoditas apelnya, pemandangan alam, air terjun, sumber air panas, agrowisata, wisata petualangan, pemanfaatan pekarangan rumah penduduk yang sebagian besar digunakan untuk tanaman bunga, apel, apotik hidup, dan lain sebagainya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dari segi wisata dan lingkungan hidup di samping nilai ekonomis.

Sektor pariwisata mampu menyumbang peningkatan pertumbuhan dan pendapatan daerah Kota Batu, sedangkan kegiatan pertanian yang menopang kehidupan hampir sebagian besar penduduk Kota Batu memberikan sumbangan yang tidak terlalu besar. Sektor pertanian merupakan sektor yang unik dan mempunyai ciri khas yang tersendiri dalam sektor perekonomian. Sektor ini sangat banyak menampung tenaga kerja, tetapi secara umum kontribusi sektor pertanian dalam menyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidaklah sebesar sektor perdagangan hotel dan restoran. Pada tahun

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu



2000 sektor pertanian menyumbang nilai PDRB sebesar 22,36 % dan di tahun 2010 turun menjadi 20,64 % sedangkan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, jasa, angkutan, komunikasi) sebesar 65, 95 % di tahun 2000 dan 68,67 % di tahun 2010.<sup>6</sup>

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan daerah yang tertuang dalam pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dikemukakan bahwa pengembangan wisata harus memberdayakan masyarakat setempat.

Berdasarkan konteks pemberdayaan masyarakat tersebut maka penyelenggaraan kepariwisataan harus menjadikan masyarakat sebagai salah satu objek yang dikembangkan. Masyarakat harus diberikan bekal pelatihan dan keterampilan dimana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator atau pendamping agar potensi-potensi yang dimiliki masyarakat dapat dikembangkan secara maksimal dan dapat mensejahterakan masyarakatnya secara mandiri. Pemerintah Daerah Kota Batu telah melaksanakan program “pokdarwis” yaitu kelompok sadar wisata. Desa-desanya yang ada di Kota Batu dibentuk atau diberdayakan untuk menjadi daerah yang sadar wisata dengan mengembangkan potensi wisata yang ada di setiap desanya.

## 2. Jenis Wisata Kota Batu

Jenis wisata di Kota Batu meliputi wisata agro dan wisata bunga, wisata alam, wisata budaya, wisata rekreasi, wisata minat khusus, wisata sejarah, wisata religi, wisata ziarah, wisata husada dan wisata kuliner.

### a. Wisata Agro dan Wisata Bunga

<sup>6</sup>Badan Pusat statistik Kota Batu, 2011. Kota Batu dalam Angka 2011, Badan Pusat Statistik, Kota Batu



Kota Batu memiliki ciri khas dengan agrowisatanya berupa tanaman bunga, apel, stroberi dan sayur mayur. Berikut obyek wisata agro dan bunga di Kota Batu:

- 1) Kusuma Agrowisata;
  - 2) Wisata Agro Punten;
  - 3) Wisata Bunga Sidomulyo.
- b. Wisata Alam

Kondisi geografis Kota Batu yang dikelilingi dengan pegunungan dengan udara yang sejuk sangat cocok untuk berwisata alam. Bagi wisatawan yang ingin melepaskan kepenatan ataupun berefreshing dapat melakukan aktivitas wisata sambil menikmati keindahan alam Kota Batu.

Berikut obyek wisata alam di Kota Batu :

- 1) Pemandian Air Panas Cangar;
  - 2) Pemandian Air Panas Songgoriti;
  - 3) Camping Ground;
  - 4) TAHURA (Taman Hutan Raya) Junggo;
  - 5) Air Terjun Coban Talun;
  - 6) Air Terjun Coban Rais.
- c. Wisata Budaya

Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia.

Di Kota Batu, kebudayaan tradisional tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai suatu tradisi budaya yang dipegang teguh masyarakatnya.

Adapun keindahan tradisi budaya Batu dapat dilihat pada atraksi wisata berikut :

- 1) Sedekah Bumi;
- 2) Grebed Desa;
- 3) Tari Sembrama;
- 4) Maulud Nabi Muhammad SAW;
- 5) Dokar Wisata.



#### d. Wisata Rekreasi

Di wilayah Kota Batu telah dibangun tempat-tempat rekreasi wisata pendidikan dan keluarga untuk menambah daya tarik wisata di Kota Batu. Berikut obyek wisata rekreasi di Kota Batu:

- 1) Jatim Park I;
- 2) Jatim Park II;
- 3) BNS;
- 4) Kawasan Wisata Songgoriti;
- 5) Wisata Selecta;
- 6) Tirta Nirwana;
- 7) Eco Green Park;
- 8) Alun-alun Kota Batu;
- 9) Museum Satwa;
- 10) Museum Angkut.

#### e. Wisata Minat Khusus

Wisata minat khusus merupakan wisata yang diselenggarakan dengan tema khusus seperti olahraga paralayang, arung jeram dan mountain bike. Bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu dan ingin menguji adrenalin dapat berkunjung ke obyek wisata berikut :

- 1) Wisata Paralayang;
- 2) Wisata Arung Jeram;
- 3) Wisata Sepeda Gunung;
- 4) Wisata Bumi Perkemahan.

#### f. Wisata Sejarah

Wisata sejarah yang ada di Kota Batu berupa situs peninggalan bangunan candi, rumah peristirahatan dan goa jaman Jepang. Berikut obyek wisata sejarah yang ada di Kota Batu:

- 1) Candi Supo Songgoriti;
- 2) Patung Ganesha;
- 3) Makam Tuan Denger;
- 4) Wisma Bima Sakti Selecta;
- 5) Kartika Wijaya; Goa Jepang Cangar;
- 6) Goa Jepang Tlekung.



### g. Sarana Akomodasi Wisata

Potensi obyek wisata yang ada di Kota Batu juga didukung oleh adanya kelengkapan sarana wisata yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan ketika berkunjung ke Kota Batu. Sarana akomodasi merupakan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata lebih dari 24 jam.

### 3. Perkembangan Sektor Pariwisata Dan Transportasi Kota Batu

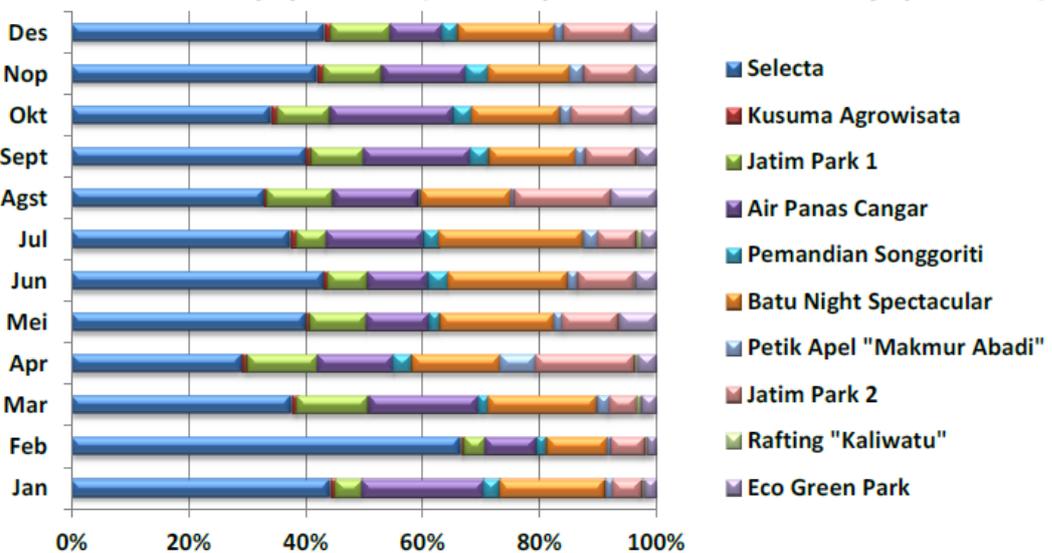
Sektor Transportasi di Kota Batu saat ini banyak menggunakan Angkutan umum dengan mengandalkan prasarana jalan beraspal dengan kondisi mencapai 70 % dalam keadaan baik sedang sisanya dalam keadaan rusak. Sarana Transportasi untuk menuju Wisata Kota Batu sangat mudah, dari Terminal Kota Malang (40 menit), Terminal Kota Jombang (2,5 jam) maupun Terminal Kota Kediri (2,5 jam). Jika dari Bandara Abdurrahman Saleh dan Stasiun Kereta Api Kota Malang juga sekitar 40 menit. Di masa mendatang Pemerintah Kota Batu berkeinginan besar untuk menjadikan kereta gantung sebagai salah satu sarana transportasi masyarakat. Kereta gantung dipilih mengingat kondisi geografis kota terletak di lereng Gunung Arjuno dan Panderman. Dengan pengembangan kawasan tanpa mengganggu lahan pertanian milik masyarakat kereta gantung diharapkan dapat mengurai kemacetan yang terjadi saat akhir pekan.

Kota Batu memiliki daya tarik terhadap pihak investor untuk menanamkan modal nya di bidang sarana wisata khususnya jasa akomodasi /penginapan berupa hotel, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah hotel yang beroperasi di kota wisata ini. Jumlah hotel pada tahun 2012 tercatat



sebanyak 473 usaha, pada tahun 2013 menjadi 476 usaha. Hal ini diikuti juga dengan meningkatnya jumlah tamu yang datang ke hotel. Pada tahun 2013 ini jumlah tamu sebanyak 1.165.104 orang, Terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 1.143.023 orang. Kenaikan jumlah tamu tersebut menyebabkan bergesernya indikator indikator lain yang berkaitan dengan kunjungan wisatawan ke kota Batu.

Tujuan pariwisata di kota Batu pun juga mengalami variasi setiap bulannya. Adapun Grafik Persentase Pengunjung Objek Wisata dirinci Menurut Bulan dan Tempat Wisata di Kota Batu, tahun 2013 sebagai berikut;



Gambar 3

#### 4. Strategi Pengembangan Sektor Wisata Berbasis Kawasan

Kota Batu merupakan peningkatan kota administratif dari Kabupaten Malang, berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu. Kota Batu terdiri atas 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030, Kota Batu ditetapkan berdasarkan fungsi wilayahnya terbagi atas 3 Bagian Wilayah Kota (BWK).

Kecamatan Batu ditetapkan sebagai BWK I sebagai peruntukan pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesanggrahan. Kecamatan Junrejo sebagai BWK II yang diperuntukkan sebagai pengembangan permukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo dan BWK III sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Bumiaji dengan pusat pelayanan di Desa Punten.

## **5. Kontribusi Sektor Wisata Sebagai Penyerap Tenaga Kerja dan Pendapatan Pengembangan kepariwisataan di Kota Batu**

Perkembangan sektor pariwisata ini perlu diimbangi dengan penyediaan kamar-kamar hotel, restoran maupun akomodasi yang lainnya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran untuk akomodasi tersebut. Sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6210 dari 273.020 orang yang bekerja. Selain



memiliki peran terhadap penyerapan tenaga kerja, sektor pariwisata Kota Batu ini memiliki kontribusi terhadap pendapatan.

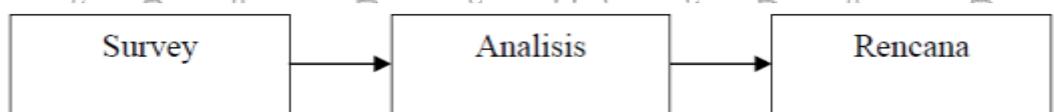
## 6. Strategi dan Pendekatan Pengembangan Agrowisata di Kota Batu dengan *Community Based Tourism*

### a. Program-Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan Agrowisata

Tim Deliveri (2004) menyatakan proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*).

Program-program pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu adalah berupa pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang ada. Upaya-upaya untuk pengembangan agrowisata di Kota Batu yang melibatkan seluruh *stakeholders* termasuk masyarakat di dalamnya, sehingga potensi wisata yang dimiliki bisa mensejahterakan masyarakat Kota Batu karena konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan langkah efektif untuk menjadikan sektor pariwisata memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Program top down dari Pemerintah Kota Batu yakni “pokdarwis” sebagai bagian dari partisipasi masyarakat Kota Batu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batu dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

### 1) Keterlibatan Masyarakat di dalam Proses Perencanaan Pengembangan Agrowisata di Kota Batu



Gambar 4 Struktur Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Berdasarkan gambar di atas partisipasi masyarakat Kota Batu dalam perencanaan adalah sebagai berikut;

- a) Survey, masyarakat diikutsertakan dalam praktek lapangan dengan memberikan pembelajaran terhadap fakta yang terjadi di suatu daerah. Dengan melihat secara langsung *problem* yang ada, masyarakat telah memiliki gambaran dalam membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi yang ada.
- b) Analisis, di sini masyarakat menganalisis suatu masalah yang terjadi dengan berdasarkan kuisoner yang dibagikan kepada masyarakat melalui pokdarwis.
- c) Rencana, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh masyarakat, maka kemudian masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata dalam membuat suatu perencanaan pengembangan agrowisata.

### 2) Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Agrowisata di Kota Batu

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, alat, dan media. Adapun yang dimaksud dengan sarana pariwisata menurut Yoeti (1993:184) adalah, "semua

fasilitas yang memungkinkan agar sarana pariwisata dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beranekaragam. Sarana dan prasarana pengembangan agrowisata di Kota Batu sudah sangat memadai, mulai dari sarana pokok (hotel, rumah makan, dan biro perjalanan), sarana pelengkap (sarana rekreasi dan sarana olah raga), dan sarana penunjang (panti pijat). Prasarana umum dan prasarana kebutuhan pokok pola hidup modern dan tersebar dengan baik.

**3) Promosi Agrowisata di Kota Batu**

Berikut merupakan beberapa definisi promosi yang diungkapkan oleh Kotler dan Keller (2009,510), “Promosi adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual.”

Berbagai macam bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu banyak dipengaruhi oleh kebutuhan dinas serta berdasarkan target peningkatan komoditas pariwisata untuk menambah devisa Negara. Dalam melakukan promosi Dinas Pariwisata Kota Batu bekerjasama dengan pihak Kusuma Agrowisata.

**4) Mendorong tumbuhnya *partnership* (kemitraan)**

Demi terciptanya otonomi daerah, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014





tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah Kota Batu berhak melakukan kebijakan sendiri dengan melakukan program-program yang sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah, yaitu melalui sektor pariwisata yang berbasis pertanian. Program-program tersebut antara lain adalah dengan melakukan kerjasama/kemitraan dengan institusi swasta yang berkomitmen penuh terhadap kemajuan sektor pariwisata berbasis pertanian, yaitu melakukan *partnership* dengan Kusuma Agrowisata, yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan.

Dari implementasi kebijakan mengenai Pengembangan Kawasan Pariwisata Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, bahwa pemerintah kota batu telah melaksanakan peraturan daerah kota batu nomor 1 tahun 2013 pasal 5 huruf e melalui program-program yang dicanangkan Kota Batu untuk pemberdayaan masyarakat setempat.

Walaupun dalam pelaksanaannya hanya diawal saja dilaksanakan, dan selanjutnya penerapan kebijakannya kurang maksimal juga kurang efektif. Dan masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang dialami pemerintah kota batu, yaitu dalam hal ini hambatan yang dialami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Karena menurut teori van meter dan van horn, Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam



rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Tindakan yang telah dilakukan pemerintah daerah kota batu yaitu telah mengundang peraturan daerah kota batu nomor 1 tahun 2013 khususnya pasal 5 huruf e dengan program-program yang dimiliki Kota Batu untuk pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk pengembangan agrowisata kota batu guna peningkatan pendapatan asli daerah kota batu dan pemberdayaan masyarakat kota batu yang didukung dengan penyediaan anggaran oleh Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan program tersebut.

Akan tetapi, pemerintah Kota Batu hanya melaksanakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 diawal tanpa ada kelanjutan dari Pemerintah Daerah Kota Batu utamanya dalam hal pemberdayaan masyarakatnya, seperti dalam program “pokdarwis” pemerintah kota batu melakukan pemberdayaan masyarakat hanya diawal selanjutnya masyarakat berjalan sendiri tanpa arahan dari pemerintah kota batu. Maka banyak usaha dari “pokdarwis” yang tidak berjalan maksimal bahkan berhenti ditengah jalan.

**E. Faktor Penghambat dan Solusi implementasi kebijakan pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan**

**1. Faktor Penghambat**

Dari rumusan masalah yang kedua, penulis menganalisis faktor penghambat yang ada dalam implementasi kebijakan pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu bahwa ada beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan pasal 5 huruf e. Hambatan-hambatannya yaitu sebagai berikut;

- a. controlling yang belum dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kota batu karena tidak ada tim khusus dalam mengawasi program-program yang dilaksanakan di setiap desa;
- b. sinkronisasi program-program daerah kota batu khususnya dalam hal kepariwisataaan;
- c. susahny sinergitas antar skpd, masalah koordinasi peningkatan infrastruktur antar dinas-dinas terkait;
- d. masalah kebutuhan anggaran yang besar untuk pembangunan kepariwisataaan;
- e. Dinas Pariwisata belum melakukan pendataan bagi program-program “pokdarwis” yang kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat; dan





f. Terkadang ada protes dari warga untuk pendirian hotel meskipun hotel merupakan bagian dari jasa wisata.

## 2. Solusi yang diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Dari beberapa hambatan yang dialami Pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, maka dapat dianalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada yaitu: sinkronisasi program dengan masing-masing *stake holders*, rapat koordinasi antar skpd dan evaluasi, pendataan ulang

“pokdarwis” bagi masyarakat guna mendukung kota batu sebagai kota agrowisata<sup>7</sup>. Banyaknya upaya yang ingin dilakukan Pemerintah Kota Batu, hendaknya harus ada bentuk nyata dari pelaksanaannya, seperti

sinkronisasi program dengan masing-masing *stake holders* yang harus memiliki kejelasan dalam rencana programnya, adanya rapat koordinasi antar skpd dan evaluasi sangat penting dilakukan dan harus secara teratur

dilaksanakan, pendataan ulang bagi kelompok sadar wisata didesa-desa sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat harus segera dilakukan, dan pemberian informasi juga ketrampilan kepada masyarakat Kota Batu

sangat penting dilakukan untuk menekan protes warga terhadap pendirian hotel ataupun objek wisata.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan) dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Pasal 5 Huruf e telah diimplementasikan dengan rencana-rencana sebagai berikut;
  - a. Penyelenggaraan kepariwisataan Kota Batu
  - b. Jenis wisata Kota Batu
  - c. Perkembangan sektor pariwisata dan transportasi Kota Batu
  - d. Strategi pengembangan sektor wisata berbasis kawasan
  - e. Kontribusi sektor wisata sebagai penyerap tenaga kerja dan pendapatan pengembangan kepariwisataan di Kota Batu
  - f. Strategi dan pendekatan pengembangan Agrowisata di Kota Batu dengan *community based tourism*, yaitu berupa; program-program pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan Agrowisata, keterlibatan masyarakat didalam proses perencanaan



pengembangan Agrowisata di Kota Batu, sarana dan prasarana pendukung pengembangan Agrowisata di Kota Batu, promosi Agrowisata di Kota Batu, mendorong tumbuhnya *partnership* (kemitraan).

2. a. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 pasal 5 huruf e, adalah; *controlling* yang belum dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kota batu karena tidak ada tim khusus dalam mengawasi program-program yang dilaksanakan disetiap desa, sinkronisasi program-program daerah kota batu khususnya dalam hal kepariwisataan, susahny sinergitas antar skpd, masalah koordinasi peningkatan infrastruktur antar dinas-dinas terkait, masalah kebutuhan anggaran yang besar untuk pembangunan kepariwisataan, Dinas Pariwisata belum melakukan pendataan bagi program-program “pokdarwis” yang kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dan terkadang ada protes dari warga untuk pendirian hotel meskipun hotel merupakan bagian dari jasa wisata.

a. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam mengatasi hambatan yang ada, adalah; sinkronisasi program dengan masing-masing *stake holders*, rapat koordinasi antar skpd dan evaluasi, pendataan ulang “pokdarwis” bagi masyarakat guna mendukung kota batu sebagai kota agrowisata.



## B. Saran

Saran penulis terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan

Kawasan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Untuk Meningkatkan

Perekonomian Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 5 huruf e

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisata) yaitu sebagai berikut;

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Batu untuk lebih

mengefektifkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun

2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

2. Disarankan kepada Dinas-dinas terkait, mengenai

pemberdayaan masyarakat untuk membuat tupoksi khusus dan

melaksanakannya sesuai Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 1 Tahun 2013 utamanya masalah pengaturan

pengawasan.

3. Disarankan kepada masyarakat untuk mendukung dan

berpartisipasi dalam pembangunan Kota Batu sebagai Kota

Agrowisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Badan Pusat statistik Kota Batu. 2011. *Kota Batu dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistik, Kota Batu
- Basuki, Sulistyono. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Burkart, A.J. dan Medlik, S. 1987. *Tourism, Past, Present, and Future*. London
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, N.J.: Englewood Cliffs
- Heriawan. 2004. *Peranan dan Dampak Pariwisata Pada Perekonomian Indonesia: Suatu Model Pendekatan Model I-O dan SAM*. Thesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hutabarat, S dan Evans, S. 1992. *Pengantar Oseanografi*, Penerbit UI – Press, Jakarta
- Iskandar, U., dan Nugraha A.. 2004. *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak*. Yogyakarta: Debur Press
- Kochyat, H. 1983. *Pengertian Pariwisata dan Kepariwisataaan*. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang*. Jakarta: Erlangga

Lester, James P dan Joseph Stewart Jr. 2000. *Public Policy: in Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth

Marpaung dan Bahar. 2015. ”Pengertian Pariwisata”. Artikel : tersedia  
<http://manadoinblog.wordpress.com/2012/03/22/definisi-pariwisata-menurut-beberapa-ahli/>

Moleong, J Lexy 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya

Muljadi. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo

Riyanto, Yatim, 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* : Surabaya: Unesa University Press,

Sabil, Q. 2008. *Kajian Kelembagaan. Agroindustri Pangan Olahan di Kawasan Kawasan Agropolitan Kota Batu Propinsi Jawa Timur*. Thesis. IPB. Bogor.

Spillane J.J,1982. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius,150 halaman.Utama. Jakarta, hal. 20

Wahab, S. 1975. *Definisi pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Winarno, F.G., 2002. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Yoeti, O. A. 1994. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa hal 103

Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Semarang: Kanisius.





Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan  
Kepariwisataa

Peraturan Walikota Batu Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas  
dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Internet

<http://fanny&c2blog.blogspot.co.id/p/profil-kota-batu.html>

<http://kotabatu.web.id/item/profil-dinas-kebudayaan-dan-pariwisata-kota-batu/>